
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU

M Fajar Anugerah¹; Mhd Rafi Yahya²; Muhammad Fadhli³

^{1,2}Universitas Abdurrab; ³Universitas Sriwijaya

e-mail: fajar.anugerah@univrab.ac.id

Received: 25 Juni 2024

Accepted: 28 Juni 2024

Published: 28 Juni 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Sukajadi dengan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan Model Implementasi kebijakan public dikemukakan oleh Edward III menunjuk adanya 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah Komunikasi, yaitu menunjuk setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program atau kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group), Sumber daya, yaitu setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, Disposisi, atau sikap adalah watak dan karakteristik yang menempel erat kepada implemendor kebijakan/program dan Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk pada struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dimana komunikasi efektif kebijakan dan program belum berjalan pada aspek koordinasi terhadap intensitas komunikasi belum berjalan maksimal antar stakeholder yang terlibat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of regional regulation number 8 of 2014 concerning waste management in Sukajadi District with a qualitative research method. The theory used is based on the public policy implementation model proposed by Edward III, which shows that there are 4 (four) variables that play an important role in achieving successful implementation. The four variables are Communication, which shows that each policy can be implemented properly if

there is effective communication between the program or policy implementer and the target group, Resources, which means that each policy must be supported by adequate resources, Disposition, or attitude is a character and characteristic that is closely attached to the policy / program implementor and Bureaucratic Structure, which refers to the bureaucratic structure being important in policy implementation. The results of the research on the Implementation of Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management in Sukajadi District, Pekanbaru City where effective communication of policies and programs has not been running on the aspect of coordination on the intensity of communication has not run optimally between the stakeholders involved. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: *Implementation, Local Regulation, Waste Management.*

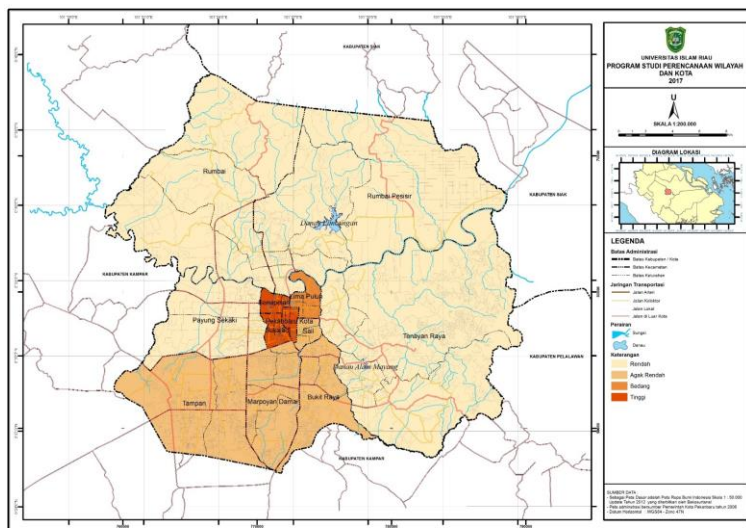
A. PENDAHULUAN

Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh (slum area) serta lingkungan yang jauh dari persyaratan kehidupan yang layak (Yogiesti et al., 2010). Sedangkan masalah lingkungan perkotaan yang juga tidak lepas dari masalah tersebut, dimana banyak rumah yang berkualitas rendah, berkepadatan tinggi, tidak teratur dan adanya rumah-rumah kumuh (slum area) yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi penduduknya.

Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan perkotaan yang baik mengakibatkan warga yang menempatnya merasa tenang, aman dan dapat tinggal dengan tenang (Alamanda & Hadiansyah, 2020). Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang - undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. itu artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi (Asliati, 2017).

Timbunan sampah apabila tidak dikelola dengan rutin berakibat pada tumpukan sampah yang berdampak pada lingkungan dan gangguan kesehatan. Volume sampah yang besar dan beranekaragam jenisnya jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan (Rabbani et al., 2022). Paradigma baru dalam pengelolaan sampah lebih menekankan pada pengurangan sampah dari sumber untuk mengurangi jumlah timbulan sampah serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. Maka dari itu, prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sejalan dengan pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Gambar 1
Peta Administrasi Kota Pekanbaru



Sumber: Dokumen Program Studi Perencanaan Wilayah UIR

Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu Kecamatan yang berada ditengah-tengah wilayah administrasi Kota Pekanbaru dan menjadi central/percontohan karena posisinya berada pada jantung Kota Pekanbaru, sehingga sehingga perkembangan kependudukan akan terasa sangat berkembang pesat dan merupakan daerah penghasil sampah No. 3 Terbesar setelah kecamatan Tampan dan Senapelan. Permasalahan sampahpun tidak luput dari Kecamatan Sukajadi dimana timbulan sampah mencapai 10.986 m^3

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk mendukung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali. Sememtara pasal 15 menjelaskan bahwa penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah.

Permasalahan sampah dikecamatan sukajadi cukup kompleks mulai dari minimnya TPS legal hingga melemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Tercatat melalui situs media center riau terdapat sebanyak 2 TPS yang terdapat di Kecamatan Sukajadi yakni pada pasar cikpuan dan dijalan teratai, tentu jumlah TPS yang terbatas tersebut tidak sesuai dengan rasio jumlah masyarakat sukajadi 47.364/jiwa. Pelemahan kesadaran masyarakat sukajadi terlihat pada masih banyaknya aduan masyarakat berkaitan dengan pembuangan sampah di tempat-tempat umum yang tidak semestinya, seperti trotoar, parit, dan lahan kosong.

Pengangkutan sampah dilakukan dengan beberapa zona pengangkutan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, seperti pada Wilayah Zona 1 dengan persebaran wilayah Kecamatan Tampar, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai sedangkan untuk Zona 2 terdiri dari Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota. lima puluh, Sail, bukit Raya dan Pekanbaru Kota sebagai bentuk pemrosesan dan pengangkutan sampah yang ada di Pekanbaru, namun terdapat permasalahan pada PT. Godang Buah Jaya (GTJ) sebagai pemenang tender sehingga pihak Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengambil alih pelaksanaan pengangkutan sampah serta mengatur ulang proses tender untuk pengangkutan sampah selanjutnya mengingat perusahaan yang bermasalah tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

Berdasarkan fenomena diatas maka diharapkan tulisan ini mampu meberikan gambaran dan masukan terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Sukajadi melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukajadi

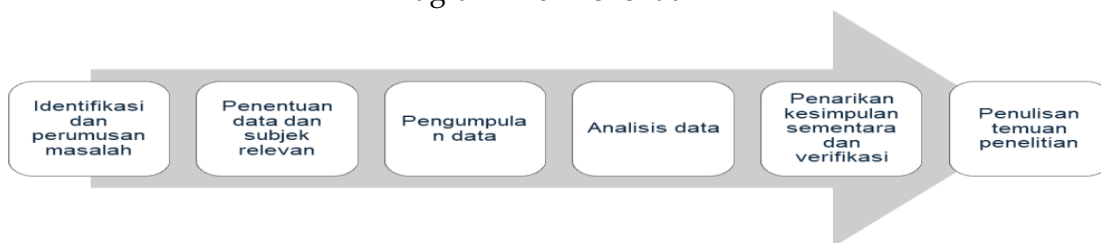
B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Lexy J. Moleong, 2019), dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk memilah siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini. Sebab, tidak semua orang dapat memahami permasalahan ini terutama pihak-pihak dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di kecamatan Sukajadi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif dengan datang ketempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara dilakukan guna mengkonfirmasikan data dan memperoleh keterangan. Penelitian ini menggunakan interview guide berupa daftar pertanyaan. Dokumentasi digunakan dengan mempelajari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi dan perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan sementara dan verifikasi, dan terakhir penulisan hasil penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tahapan identifikasi dan perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, dan akan berlanjut pada tahapan berikutnya selama waktu pengusulan sesuai dengan alir penelitian yang dibuat.

Gambar 2
Diagram Alur Penelitian



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu sosial yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru terutama masalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok merupakan suatu fenomena besar yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Seiring dengan datangnya modernisasi dalam aspek kehidupan menyebabkan semakin menipisnya kesadaran akan makna sebuah lingkungan yang lestari, dengan semakin modernnya kehidupan seharusnya kesadaran akan lingkungan semakin tinggi, namun saat ini yang terjadi tidaklah demikian bahkan sebaliknya, Masyarakat belum benar-benar sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat,

minimnya kesadaran tersebut terlihat dari perilaku masyarakat yang tidak mentaati himbawan-himbawan pemerintah (Akhrani et al., 2021).

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang sampah tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan yaitu pada pukul 19.00 s/d 05.00 sehingga sampah tersebut tidak terangkut oleh petugas dan menumpuk. Sehingga, masyarakat mereduksi sampah yang ada dengan cara membakar atau menimbun di tanah dekat rumahnya dan lebih parahnya lagi masih adanya masyarakat yang tidak ingin berkontribusi untuk membayar iuran sehingga masyarakat tersebut menumpuk dan mereduksi sampahnya dengan cara dibakar sehingga dampak asapnya sangat mengganggu masyarakat lain dilingkungan tersebut.

Sebagai pihak yang memprakarsai cara penanggulangan sampah dengan program bank sampah ini, dengan adanya program ini seharusnya pemerintah dapat berbuat banyak untuk meningkatkan peran masyarakat jika program ini sudah mulai tumbuh ditengah masyarakat pemerintah harus menjaga supaya program ini dapat berkesinambungan dan dikembangkan menjadi lebih besar dan modern, dengan sumberdaya yang terbatas masyarakat tidak mempunyai ruang gerak yang cukup untuk mengembangkan usahanya secara maksimal berbeda dengan pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat melakukan riset, pengembangan teknologi seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai jual tinggi disamping itu juga dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat kota Pekanbaru dan sekitarnya (Sunaryo, 2020).

A. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini menunjuk bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (Kebijakan) dengan para kelompok sasaran (Ismawanti, 2021). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Dalam Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menjalun koordinasi dan pembagian tugas bidang sesuai dengan tufoksi masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder terkait bahwa telah menjalankan komunikasi terarah dengan berbagai elemen yang saling berkaitan dengan kebijakan yang

akan dilakukan. Sehingga diharapkan mampu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang bertanggung jawab.

Dinas terkait juga mengupayakan mesosialisasikan peraturan daerah tersebut dengan sebaik mungkin yang dimulai dari pegawai pemerintah dan menyentuh kepada masyarakat sehingga dalam pengelolaan sampah dikecamatan sukajadi kedepannya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kemudian dalam implemmentasi kebijakan tersebut, dilakukanlah rapat-rapat kerja sebagai upaya pembagian tugas tersebut (Ferronato & Torretta, 2019). metode yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dengan melakukan rapat-rapat kerja yang dilakukan sesuai keperluan mendesak seperti seminggu bahkan sebulan sekali berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas tersebut terutama pada pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dengan melakukan rapat-rapat kerja yang dilakukan sesuai keperluan mendesak seperti seminggu bahkan sebulan sekali berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas tersebut terutama pada pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Rapat-rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pihak pemerintah daerah, perwakilan komunitas, LSM, dan sektor swasta yang memiliki peran dalam manajemen sampah. Setiap rapat dirancang untuk mengevaluasi progres, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan merumuskan solusi serta tindakan korektif yang diperlukan.

Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang untuk mengoordinasikan berbagai program edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya itu, rapat juga digunakan untuk mendiskusikan alokasi sumber daya, baik itu finansial maupun logistik, serta penjadwalan pelatihan bagi petugas kebersihan dan anggota komunitas yang terlibat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antar berbagai pihak dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sukajadi.

B. Sumber Daya

Sumber Daya menunjuk setiap kebijaka harus didukung oleh sumber daya manusia yang dilihat dari tingkat pendidikan, pemahaman tujuan dan sasaran tugas dalam Implementasi Kebijakan, serta anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penunjang terlaksananya tugas - tugas organisasi yang diberikan sesuai

dengan tufoksinya. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam penyelesaian tugas, karena apabila kemampuan pegawai sangat berkompeten, tentu akan mendukung pelaksanaan tugas tersebut (Sunnyoto, 2012).

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak kecamatan sukajadi bahwa telah memaksimalkan dengan kebutuhan yang ada dan kita juga membentuk tim untuk penanggulangan dan pengelolaan sampah dilapangan. Adapun kendala dalam sumber daya manusia ini adalah peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah sudah berjalan dengan baik hanya saja terkendala pada anggaran yang belum memadai untuk kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Sukajadi. Anggaran yang mendukung Impelementasi Kebijakan tersebut maka seluruh tugas yang dibebankan akan disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan unit kerja. Anggaran yang belum memadai dan masih dipergunakan untuk program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya merupakan pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah terkhusus pemerintah kecamatan sukajadi.

C. Disposisi

Disposisi adalah menunjuk pada karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Kejujuran dan komitmen pegawai dalam pelaksanaan tugas sangat diperlukan, terutama mereka harus memiliki integritas yang tinggi pula. Berdasarkan wawancara dengan pihak kecamatan sukajadi terkait Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah untuk pegawainya dituntut untuk memiliki integritas dan tingkah laku yang baik dalam pelaksanaan tugas yang baik guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan tersebut (Ismiartha, 2021).

Selanjutnya selain komitmen para pegawai dalam pelaksanaan tugas juga dituntut harus menyelesaikan seluruh masalah dengan baik dan sesuai aturan. sikap demokratis pegawai dengan menyelesaikan masalah masalah yang terjadi dengan pimpinan sehingga tidak ada masalah yang tidak selesai pada impelementasi kebijakan ini. Pengangkutan sampah menggunakan truk/gerobak memang sangat diperlukan untuk memudahkan kegiatan tersebut dna ketersediaan truk juga harus memadai sehingga aktifitas pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah dan pegawai saja. Partisipasi aktif dari

masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan, hingga pembuangan akhir. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk harus ditingkatkan. Program-program seperti bank sampah, daur ulang, dan komposting perlu terus diperkenalkan dan didorong untuk menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari para pegawai, partisipasi aktif dari masyarakat, peningkatan infrastruktur dan teknologi, serta kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan sampah di Kecamatan Sukajadi dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup 2 aspek penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri yang memiliki standar operasional prosedur (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020). tugas masing-masing pegawai sudah disosialisasikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga dengan harapan tidak ada lagi tumpang tindih dalam Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. Penjabaran struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas pegawai juga harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara berbagai tingkatan birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam penyampaian informasi dan kebijakan kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan sampah. Mekanisme monitoring dan evaluasi juga perlu diterapkan secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, penting juga untuk melibatkan sektor swasta dan komunitas lokal sebagai bagian dari struktur organisasi yang mendukung kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat, memastikan bahwa setiap pihak berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan perannya. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah tidak hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang efektif, didukung oleh komunikasi yang baik, adopsi teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas pegawai, merupakan kunci utama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dijelaskan melalui beberapa *point of view* yakni a. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi efektif kebijakan dan program belum berjalan pada aspek koordinasi terhadap intensitas komunikasi belum berjalan, Sumber Daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial mulai berjalan dengan baik terutama pada ketersediaan anggaran yang belum memadai, disposisi Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis dimana ketiga hal tersebut sudah berjalan dengan baik dimana integritas pegawai sudah maksimal dan struktur birokrasi mencakup 2 aspek penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri sudah berjalan dengan baik dan maksimal.

Meskipun beberapa aspek implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 menunjukkan tanda-tanda kemajuan, tantangan signifikan masih ada. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sukajadi tetap rendah. Ini tercermin dari data yang menunjukkan penurunan partisipasi dalam program bank sampah dan rendahnya tingkat pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Selain itu, jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik terus meningkat, dan frekuensi pengaduan terkait penumpukan sampah ilegal juga mengalami kenaikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan peningkatan dalam beberapa area kunci. Pertama, perlu adanya intensifikasi komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya, baik manusia maupun finansial, untuk mendukung program pengelolaan sampah. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan pengelolaan sampah harus ditingkatkan

untuk memastikan kepatuhan. Terakhir, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan pengelolaan sampah di Kecamatan Sukajadi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akhrani, L. A., Herani, I., & Hany, A. (2021). ... Komunitas Peduli Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Bencana & Kesehatan pada Warga Bantar Kali di Kampung Payung Kertas, Malang. In *Journal of Dedicators Community*. researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Lusy-Asa-Akhrani/publication/353837133_59_Journal_of_Dedicators_Community/links/611473e4169a1a0103f529d0/59-Journal-of-Dedicators-Community.pdf
- Alamanda, D. T., & Hadiansyah, H. (2020). Rancangan Solusi Pengelolaan Sampah Dengan Konsep Focus Group Discussion (Fgd) Penta Helix Di Kabupaten Garut. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4, 226–240. <http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/270>
- Asliati, A. (2017). Kondisi Sosial Ekonomi Komunitas Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru: Fenomena Dan Solusi. *Sosial Budaya*, 14(2), 150. <https://doi.org/10.24014/sb.v14i2.4430>
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060.
- Ismawanti, R. (2021). Penguatan Manajemen Komunikasi Organisasi Dalam Mengoptimalkan Motivasi Kinerja Pegawai Pt. Telkom Indonesia Tbk. Divreg 3 Jawa Barat. *LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 4(1), 72–80.
- Ismiartha, G. R. (2021). Analisis Stakeholders dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklam) sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy ...*, 10(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30591>

- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Nurhestitunggal, M., & Muhlisin, M. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 1-20.
- Rabbani, A., Sabrina, A., & ... (2022). Pengelolaan Sampah Melalui Pendidikan Kesadaran Bersih Lingkungan Sebagai Strategi Mitigasi Bencana di Desa Seriwe. In *Jurnal*
download.garuda.kemdikbud.go.id.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2475444&val=13782&title=Pengelolaan Sampah Melalui Pendidikan Kesadaran Bersih Lingkungan Sebagai Strategi Mitigasi Bencana di Desa Seriwe](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2475444&val=13782&title=Pengelolaan+Sampah+Melalui+Pendidikan+Kesadaran+Bersih+Lingkungan+Sebagai+Strategi+Mitigasi+Bencana+di+Desa+Seriwe)
- Sunaryo, A. (2020). Implementasi pemberdayaan perempuan melalui 10 program pokok PKK. *Public Service and Governance Journal*.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgi/article/view/1565/0>
- Sunyoto, D. (2012). Manajemen sumber daya manusia. *Yogyakarta: Caps*.
- Yogiesti, V., Hariyani, S., & Sutikno, F. R. (2010). Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*.